

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki daerah kepulauan terluas di dunia dengan garis pantai kurang lebih 95.181 km atau setara dengan 14 persen dari panjang garis pantai dunia. Persoalan pesisir di Indonesia menjadi isu yang serius akibat terjadinya bencana. Bencana yang terjadi di wilayah pesisir disebabkan karena adanya gertakan yang terjadi dari daratan seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain (Aris, 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non alam dan faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan memiliki 10 kecamatan, 15 kelurahan dan 36 desa. Luas wilayah Kabupaten Bintan mencapai 88.038,54 km², namun luas daratannya hanya 1.946,13 km² atau setara dengan 2,21%, dan sisanya lautan sedangkan luas lautannya 86.092,41 km² atau setara dengan 97,79%. Dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1 Peta Daerah Dataran Rendah Kabupaten Bintan



Sumber: *Kabupaten Bintan Dalam Angka 2022*.

Dilihat dari luasnya wilayah laut Kabupaten Bintan, bencana alam berupa banjir rob menjadi bencana yang selalu terjadi khususnya pada wilayah pesisir, hal ini lah yang membuat peneliti tertarik untuk mangambil studi kasus di wilayah pesisir Bintan.

Tabel 1.1 Jumlah Kejadian Bencana Banjir Di Kabupaten Bintan

No	Kecamatan	Jumlah Kejadian		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Bintan Timur	2	2	7
2.	Toapaya	-	-	8
3.	Teluk sebong	-	1	1
4.	Bintan Utara	8	1	10
5.	Seri Kuala Lobam	-	-	10
6.	Gunung Kijang	2	-	8
7.	Teluk Bintan	-	-	7
8.	Tambelan	1	-	5
9.	Mantang	-	-	3
10.	Bintan Pesisir	-	-	3
Total		13	4	62

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bintan, 2022
(Telah Diolah Peneliti)

Berdasarkan wawancara pra penelitian yang telah peneliti lakukan bersama Bapak Erwan S.Sos selaku Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan, pada

tanggal 16 November 2022, pukul 11.00 WIB, beliau mengatakan bahwasannya Kabupaten Bintan setiap tahunnya dilanda banjir rob dengan ketinggian air laut pasang 0,50 m – 1 m, dengan intensitas curah hujan sedang dan kemudian gelombang diperkirakan mengalami ketinggian 3,5 meter. Banjir rob di wilayah pesisir Bintan terjadi pada musim angin utara, yaitu dimulai pada bulan Desember sampai dengan bulan Februari.

Adapun wilayah pesisir Bintan yang terdampak banjir rob dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Wilayah Pesisir Bintan Terdampak Banjir Rob
Januari Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah KK Terdampak
1.	Bintan Utara	Tanjunguban Kota	359
		Tanjung Uban Selatan	3
		Tanjung Uban Utara	3
2.	Mantang	Mantang Besar	75
		Mantang Baru	23
		Mantang Lama	91
		Dendun	79
3.	Bintan Pesisir	Numbing	53
		Air Gelubi	59
		Kelong	49
		Mapur	3
4.	Sri Kuala Lobam	Teluk Sasah	30
		Busung	47
		Kuala Sempang	28
		Tanjung Permai	1
		Teluk Lobam	8
5.	Teluk Bintan	Penaga	55
		Tembeling	101
		Pengujan	72
		Pangkil	2
		Bintan Buyu	69

6.	Teluk Sebong	Pengudang	5
		Sri Bintang	26
		Ekan Aculai	17
		Kota Baru	13
7.	Gunung Kijang	Malang Rapat	19
		Kawal	28
8.	Tambelan	Batu Lepuk	1
		Kampung Melayu	1
9.	Bintan Timur	Kijang Kota	199
		Sei Enam	32
		Sei Lekop	98
		Gunung Lengkuas	4

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bintan, 2023
(Telah Diolah Peneliti)

Berdasarkan wawancara pra penelitian yang telah peneliti lakukan dengan Bapak Muhammad Miraj S.Sos selaku Plt. Sekretaris BPBD, Plt. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, pada tanggal 16 November 2022, pukul 14.00 WIB, beliau mengatakan bahwasannya penanganan banjir rob yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah pesisir Bintan belum optimal dikarenakan kurangnya koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bintan. Selain itu koordinasi antar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan pemangku kepentingan seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat juga masih belum efektif.

Ancaman kebencanaan seperti ini diperlukan adanya antisipasi dan penanganan serta program yang terarah dan terpadu yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai badan pemerintah non-

departemen yang tugas dan bertanggungjawab dalam menangani masalah bencana di daerah kabupaten/kota dengan strategi yang bergantung kepada kondisi yang ada di organisasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peran terpenting pada proses analisis terhadap bencana dan evakuasi, termasuk bencana banjir rob sesuai dengan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan yaitu “Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bintan Dalam Menghadapi dan Menanggulangi Bencana”. Hal tersebut dapat terwujud tentu karena di pengaruhi oleh strategi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan formulasi judul ***“Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan dalam Penanganan Banjir Rob di Wilayah Pesisir Bintan”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan dalam Penanganan Banjir Rob di Wilayah Pesisir Bintan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Bintan dalam Penanganan Banjir Rob di Wilayah Pesisir Bintan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian terhadap permasalahan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pandangan yang baru mengenai strategi instansi pemerintahan daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan dalam penanganan banjir rob.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca terutama pemerintah Kabupaten Bintan agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan strategi penanganan banjir rob agar lebih baik dan maksimal lagi dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bintan.